ALIRAN ILMU NEGARA MENURUT SAINT SIMON
NAMA :Tauza

BP: 2110003600068

tauzafitriani@gmail.com

universitas ekasakti padang

A.PENDAHULUAN

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat mengerjakan makalah ini yang berjudul aliran ilmu Negara menurut Saint Simon sebagai salah satu syarat memenuhi mata kuliah di Universitas Ekasakti Padang.

Istilah ilmu Negara diambil dari bahasa Belanda *staatsleer* yang diambil dari istilah bahasa Jerman *staatslehre* dalam bahasa Inggris disebut *theory of state* atau *political theory*, sedangkan dalam bahasa Prancis dinamakan *theorie de l'état*. Timbulnya istilah ilmu Negara atau *staatsleer* sebagai istilah teknis adalah sebagai akibat penyelidikan dari seorang serjana bernama George Jellinek ia terkenal sebagai bapak ilmu Negara. Ilmu Negara adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki asas-asas pokok dan pengertian-pengertian pokok tentang Negara dan hukum tata Negara. Munculnya ilmu Negara sebagai ilmu pengetahuan yang dapat berdiri sendiri adalah berkat jasa George Jellinek ia membagi ilmu kenegaraan menjadi dua bagian yaitu;

1. ilmu Negara dalam arti sempit [*staatswissenschaften*]

2. ilmu pengetahuan hukum [*rechtswissenschaften*] yang dimaksud George adalah hukum publik yang menyangkut soal kenegaraan misal hukum tata Negara, administrasi Negara, hukum pidana dan sebagainya.

Ilmu Negara merupakan mata kuliah pengantar. Sebagai mata kuliah pengantar ilmu Negara tidak mempunyai nilai praktis, tetapi memiliki nilai yang teoritis. Maksud dari pernyataan ini adalah pengetahuan dari mata kuliah ilmu Negara tidak dapat menggunakan hasil langsung di praktek. Materi ilmu Negara terdiri dari tiga kegiatan belajar, yaitu pengertian objek ilmu Negara, hubungan antar ilmu Negara dan ilmu politik, serta ilmu kenegaraan serta aliran-aliran ilmu Negara.

Dalam fakultas hukum mata kuliah ilmu Negara di golongan ke dalam mata kuliah persiapan sama seperti halnya mata kuliah pengantar ilmu hukum, tugas dari mata kuliah tersebut sebagai pengantar terhadap mata kuliah seperti hukum tinggi. Maka ilmu Negara akan mengantarkan mahasiswa mempelajari hukum publik.

Secara sistematis ilmu Negara didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki asas-asas pokok, pengertian-pengertian pokok tentang Negara dan hukum tata Negara, serta aliran-aliran ilmu Negara.

B. PEMBAHASAN

Pengertian ilmu Negara menurut para ahli Indonesia yaitu :

1. Ilmu Negara menurut prof.H. daud busroh sh dalam bukunya yang berjudul ilmu Negara, ilmu Negara adalah ilmu yang di pengertian pengertian pokok dan sendi sendiri dari pada Negara dan hukum Negara pada umumnya.
2. Ilmu Negara menurut moh. Kusnadi, sh dan prof. dr. bintang R. saragih. MA dalam buku berjudul ilmu Negara, ilmu Negara adalah ilmu pengetahuan yang asas pokok dan pengertian pokok tentang Negara dan hukum tata Negara.
3. Ilmu Negara menurut soehino, sh dalam bukunya yang berjudul ilmu Negara, ilmu Negara adalah ilmu yang membicarakan Negara.

Berdasarkan beberapa pengertian ilmu Negara menurut para ahli dapat kata kunci secara umum bahwa ilmu Negara adalah ilmu pengetahuan yang belajar tentang Negara keseluruhan, baik itu hukum tata Negara, fungsi Negara, hakekat Negara dan lain sebagainya.

Pengertian ilmu Negara secara umum, ilmu Negara diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki asas pokok dan pengertian pokok tentang Negara dan hukum tata Negara. sebagai ilmu pengetahuan ilmu Negara memiliki 2 syarat pokok sebagai ilmu pengetahuan :

*syarat objektif, kebenaran harus dapat diterima secara umum

*syarat sistematis, pengertian yang diperoleh merupakan satu kesatuan yang erat.

Unsur ilmu pengetahuan dapat bersumber dari akal pikiran manusia dan persaannya. jika suatu bangunan hukum bersumber dari pikiran manusia maka disebut pengertian hukum. dan jika bangunan hukum bersumber dari perasaan maka disebut asas hukum. demikian ilmu negara yang didalamnya terdapat pengertian dalam ilmu Negara yang bersifat tetap dan asas yang bersifat berubah-ubah karena ada perubahan pandangan hidup.

Ada pun pendapat para ahli lain tentang pengertian ilmu Negara yaitu menurut kalsen dan krannenbung:

- a. Menurut kalsen pendapatnya bahwa ilmu Negara tidak perlu menyelidiki asal usul terjadinya Negara dan bentuknya. Tiap peninjauan Negara, organisasi Negara hendaklah dimulai dengan peninjauan sudut hukum. sedangkan persoalan asal mula terjadinya, perkembangannya atau pertumbuhan Negara tidak termasuk dalam ilmu Negara karena hal yang terakhir ini termasuk hal yang metayuridis, menurut beliau lahirnya suatu Negara sebagai suatu pernyataan yang sederhana, yang tak dapat dimasukkan dalam hal-hal yang yuridis. jadi apabila ingin membahas tentang Negara, hal yang paling baik adalah meninjau persoalan semata-mata hanya dari sudut hukum.
- b. Pendapat krannenbung ia tidak setuju dengan pendapat dari kalsen yang membatasi cara peninjauan ilmu Negara hanya dari sudut hukum saja dengan menyerahkan penyelidikan asal mula Negara kepada cabang ilmu pengetahuan yang lain, yaitu sosiologi. pandangan yang seperti itu menurut krannenbung dianggap suatu yang skeptis dan negatif karena pandangan ini telah melepaskan tugas pokok ilmu Negara sebagai cabang ilmu

pengetahuan, yaitu tentang asal mula Negara dan menyerahkannya kepada sosiologi, sedangkan tugas ini seharusnya dianggap tugas utama ilmu Negara.

Ilmu Negara itu sifatnya lebih mendekati ilmu Negara yang *spezielle* dalam sistematik George Jellinek. Dalam arti bahwa yang diselidiki, yang dipelajari atau yang dibicarakan adalah Negara dalam pengertian umum. Jadi pertama-tama harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Negara itu, hakikatnya apa, dan bagaimana terjadinya Negara itu. Jadi objeknya itu sifatnya abstrak. Maka, kalau ilmu Negara yang kita pelajari sekarang ini kita masukkan dalam sistem George Jellinek termasuk dalam ilmu Negara yang *special*.

Adapun objek ilmu Negara :

Dalam menentukan objek ilmu Negara pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu ilmu ilmu manakah yang erat dengan ilmu Negara bertalian dengan objeknya itu. Kalau kita memperhatikan kurikulum S1 PKn maka akan segera dapat diketahui bahwa yang mempunyai hubungan yang erat dengan ilmu Negara adalah :

1. hukum tata Negara republic Indonesia
2. ilmu politik kenegaraan

Sebab ilmu tersebut mempunyai hubungan yang erat satu sama lain ialah karena mempunyai objek yang sama yaitu Negara. Lalu di mana letak perbedaannya? Perbedaannya terlatak pada sudut pandang dari pada masing-masing ilmu tersebut. Adapun perbedaan itu secara singkat adalah di satu pihak, yaitu hukum tata Negara dan ilmu politik kenegaraan memandang objeknya, yaitu Negara dari sifatnya atau pengertian yang kongkret, artinya objek itu sudah terikat pada tempat, keadaan dan waktu yang telah mempunyai objek yang pasti misalnya republic Indonesia, Negara Inggris, Negara Jepang dan seterusnya.

Sedangkan ilmu Negara memandang objeknya itu, yaitu Negara dari sifat atau pengertian yang abstrak, artinya objeknya itu dalam keadaan terlepas dari tempat, keadaan dan waktu. Jadi tegasnya belum mempunyai ajektif tertentu, bersifat abstrak umum universal. Dari objeknya yang bersifat demikian, ini yang kemudian di bicarakan lebih lanjut adalah:

1. asal mula Negara
2. hakikat Negara
3. bentuk dan bentuk Negara dalam pemerintahan

Jadi tiga hal inilah yang menjadi pokok pembicaraan dalam ilmu Negara. Akan tetapi sekali lagi kita harus ingat yang menjadi objek ilmu Negara adalah Negara dalam pengertian umum – abstrak-universal. Dengan demikian tiga pokok pembicaraan diatas berarti seperti berikut:

1. mengenai asal mula Negara, itu yang dimaksud bukanlah asal mula atau terbentuknya suatu, Negara yang kongkret, Negara Indonesia, Jepang misalnya bukan itu yang dimaksud. Akan tetapi, asal mula atau terbentuknya atau terjadinya apa atau sesuatu yang dinamakan Negara, Negara dalam pengertiannya yang umum-abstrak-universal. Jadi tegasnya apa yang dinamakan Negara itu adanya hanya dalam alam pikiran, dalam angan-angan, artinya kita memikirkan

adanya, sesuatu sesuatu itu kemudian kita angkat kedalam pikiran dan disinilah kita membayangkan adanya apa yang dinamakan negara itu.

2. mengenai hakikat Negara, ini pun yang dimaksud bukan lah hakikat daripada Negara tertentu, melainkan yang dimaksud adalah hakikat dari pada apa yang dinamakan Negara itu tadi. apakah itu merupakan keluarga yang besar, atau merupakan suatu alat, atau wadah, atau organisasi atau perkumpulan ini nanti kita akan menjumpai pendapat pendapat banyak sekali. Jadi pokoknya apa atau sesuatu yang dinamakan Negara itu hakikatnya apa. dengan demikian ini berarti memberikan sifat sifat pokok dari apa yang dinamakan Negara itu.

3. mengenai bentuk Negara, membicarakan tentang kemungkinan kemungkinan bentuk yang diadakan oleh Negara. Di dalam keaneka ragam tentang bentuk bentuk Negara itu. Masih kita dapat persamaan persamaannya sehingga tidak merubah hakikat Negara.

Berkaitan dengan uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa objek ilmu Negara, hukum tata Negara, dan politik kenegaraan itu sama hanya sudut pandangnya saja yang berbeda. Ilmu Negara memandang, menyelidiki, mempelajari objeknya, yaitu Negara dalam pengertian yang abstrak umum universal, sedangkan kedua ilmu lainnya itu tadi memandang, menyelidiki, mempelajari objeknya, yaitu juga Negara dalam artian yang konkret. disinilah letak hubungan yang erat antara ilmu Negara dengan hukum tata Negara dan ilmu politik kenegaraan.

Hubungan yang erat ini menimbulkan konsekuensi bahwa ilmu Negara merupakan pengantar atau dasar daripada hukum tata negara dan ilmu politik kenegaraan dalam kurikulum S1 pkn. Tegasnya orang tidak akan dapat mempelajari hukum tata Negara dari suatu Negara dengan baik kalau belum mempelajari ilmu Negara terlebih dahulu.

Setelah memahami tentang hubungan ilmu Negara dengan ilmu politik dan ilmu kenegaraan maka selanjutnya kita akan membahas aliran aliran dalam ilmu negara

Aliran dalam ilmu Negara. Aliran aliran dalam ilmu Negara adalah paham paham atau pendapat pendapat yang pada suatu waktu dalam perkembangan sejarah manusia mempunyai pengaruh besar terhadap ketatanegaraan. untuk mengurai paham paham dalam ilmu Negara mesti dimulai dengan paham paham yang kuno yaitu paham paham Yunani kuno. salah satu aliran dalam ilmu Negara menurut filsuf Yunani kuno:

Saint Simon [1760-1835] adalah seorang bangsawan Prancis yang merasa tidak puas dengan hasil revolusi Prancis karena hasil hanya banyak dinikmati oleh bangsawan yang mempunyai ciri ciri golongan kapitalis. dalam pendapatnya Simon membagikan dua golongan dalam masyarakat yaitu golongan yang berkerja dan golongan yang malas. golongan yang malas akan menderita kekalahan karena kehilangan kewibawaan sedangkan golongan orang yang tidak berda, tidak mampu untuk memimpin masyarakat baik dalam kerohanian maupun dalam bidang politik. Untuk mencapai perubahan di masyarakat maka harus mengubah system masyarakatnya melalui pendidikan agama dan ilmu pengetahuan, yang akhirnya akan menimbulkan perjuangan kelas. dalam pertentangan kelas itu ia hendak mengubah perubahan radikal menganjurkan adanya saling mencintai sesama manusia sesuai anjuran yang diajarkan oleh agama. menurut pendapatnya politik ditentukan oleh perekonomian rakyat baik perusahaan administrasi maupun produksi sehingga kekuasaan politik

atas golongan lain harus di ubah dan akhirnya Negara akan hilang.

Selain aliran menurut saint simon ada juga aliran menurut robertowen dan fourier:

Robert owen [1772-1858] seorang pengusaha dan menganggap bahwa tenaga produktif manusia pada waktu itu tidak digunakan dengan sebaik baiknya sehingga tidak menghasilkan kemakmuran ,juga segimoral dari masyarakat itu tidak di bina dengan baik akibatnya mendapat dosa dan kemiskinan. Robert owen merupakan tokoh pertama yang mengembangkan benih benih pemikiran sosialisme inggris.

Fourier[1772-1837] seorang kritikus dan satiris. Menurut pendapatnya didalam masyarakat kapitalis terdapat penumpukan modal yang besar, yang di peroleh dari penderitaan dan kemiskinan dari pihak llain.kemiskinan akan membawa bencana yang besar terhadap moral manusia sehingga hilang lah kepribadiann dari manudia itu.

Filusuf di atas adalah cendikian sosialisme .

D.PENUTUP

Ilmu Negara adalah ilmu pengetahuan yang myelidiki asas asas pokok dan pengertian pegertian pokok tentang negara dan tata negara .dalam ilmu Negara terdapa aliran aliran ilmu Negara yang dimaksud dengan aliran ilmu Negara adalah paham paham atau pendapat pendapat yang ada pada waktu tertentu dalam perkembangan sejarah manusia yang mempunyai pengaruh besar terhadap ketatanegaraan.yang menyebabkab timbulnya aliran aliran tersebut adalah pandangan hidup dari masyarakat yang berbeda.oleh karena itu tidak heran jika aliran aliran atau paham paham yang berhubungan dengan Negara itu banya dan berbagai macam coraknya. Untuk mengurai paham paham itu kita mulai dari paham yang paling lazim yaitu paham yunani kuno salah satu pemikir atau filsuf pada zaman ini adalah saint simon beliau merupakan cendikawan sosislisme.saint simo mengemukakan pendapatnya dengan mengelompokkan manusia kedalam dua golongan .selain saint simon ada juga Robert owen dan fourier.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmini Roza dan Laurensius Arliman S, Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia, Masalah-Masalah Hukum, Volume 47, Nomor 1, 2018. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.10-21>
- Laurensius Arliman S, Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 201. <http://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346>
- Laurensius Arliman S, Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa, Padjadjaran Journal of Law, Volume 4, Nomor 3, 2017. <https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.3433>.
- Laurensius Arliman S, Penanaman Modal Asing Di Sumatera Barat Berdasarkan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Supremasi Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2018. <http://dx.doi.org/10.36441/hukum.v1i01.102>.
- Laurensius Arliman S, Memperkuat Kearifan Lokal Untuk Menangkal Intoleransi Umat Beragama Di Indonesia, Ensiklopedia of Journal, Volume 1, Nomor 1, 2018, <https://doi.org/10.33559/eoj.v1i1.18>.
- Laurensius Arliman S, Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional, Kertha Patrika, Volume 39, Nomor 3, 2017, <https://doi.org/10.24843/KP.2017.v39.i03.p03>.
- Laurensius Arliman S, Partisipasi Masyarakat Di Dalam Pengelolaan Uang Desa Pasca Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jurnal Arena Hukum, Volume 12, Nomor 2, 2019, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.5>.
- Laurensius Arliman S, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia, Dialogica Jurnalica, Volume 11, Nomor 1, 2019, <https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831>.
- Laurensius Arliman S, Mediasi Melalui Pendekatan Mufakat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional, UIR Law Review, Volume 2, Nomor 2, 2018, [https://doi.org/10.25299/uirrev.2018.vol2\(02\).1587](https://doi.org/10.25299/uirrev.2018.vol2(02).1587)
- Laurensius Arliman S, Peranan Filsafat Hukum Dalam Perlindungan Hak Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia, Doctrinal, Volume 1, Nomor 2, 2016.
- Laurensius Arliman S, Ni Putu Eka Dewi, *Protection of Children and Women's Rights in Indonesia through International Regulation Ratification*, Journal of Innovation, Creativity and Change Volume 15, Nomor 6, 2021.
- Laurensius Arliman S, *Gagalnya Perlindungan Anak Sebagai Salah Satu Bagian Dari Hak Asasi Manusia Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Mazhab Utilitarianisme*, Jurnal Yuridis, Volume 3, Nomor 2, 2016, <http://dx.doi.org/10.35586/v3i2.180>.
- Laurensius Arliman S, Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Revolusi 4.0, Jurnal Ensiklopedia Sosial Review, Volume 2, Nomor 3, 2020..